

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi gizi buruk tahun 2009-2011 melalui Perwal no.12 tahun 2009 adalah sebagai berikut:
 - a. Implementasi kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi gizi buruk tahun 2009-2011 melalui perwal no.12 tahun 2009 telah didukung dengan penyediaan tempat untuk penanganan secara komprehensif bagi balita dengan masalah gizi di Kota Yogyakarta.
 - b. Implementasi Perwal no. 12 tahun 2009 sudah dapat menangani balita dengan masalah gizi secara komprehensif sesuai dengan kewenangan. Pembentukan RPG pada tahun 2010 telah mampu menangani permasalahan gizi di kota Yogyakarta sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam perwal tersebut.
 - c. Implementasi Perwal no. 12 tahun 2009 telah dapat mendidik keluarga dan orang tua untuk perawatan kesehatan dan pengasuhan anak. Hal ini dapat terwujud karena kegiatan tersebut dikelola oleh orang-orang yang memang peduli dengan pengasuhan anak serta didukung oleh

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan peraturan walikota no. 12 tahun 2009 meliputi:
 - a. Faktor komunikasi yang meliputi pemahaman seluruh aparat pelaksana perwal no. 12 tahun 2009 yang cukup baik terhadap informasi tentang Perwal no. 12 tahun 2009 maupun tugas dan tanggung jawabnya masing-masing aparat; adanya keselarasan tindakan yang cukup baik antar organisasi pelaksana Perwal no. 12 tahun 2009 serta adanya kejelasan informasi Perwal no. 12 tahun 2009. Sayangnya implementasi kebijakan tersebut kurang didukung oleh pemahaman kelompok sasaran terhadap Perwal no. 12 tahun 2009.
 - b. Faktor sumber daya pelaksana yang meliputi jumlah aparat yang cukup memadai, kemampuan aparat yang cukup baik, jumlah anggaran yang memadai serta fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai.
 - c. Faktor sikap pelaksana yang meliputi pemahaman seluruh aparat pelaksana yang cukup baik terhadap tujuan program perwal no. 12 tahun 2009, kehadiran aparat pelaksana yang cukup tertib dalam setiap rapat koordinasi, dukungan aparat pelaksana yang cukup besar serta adanya kerja sama aparat pelaksana yang cukup baik terhadap program Perwal no. 12 tahun 2009.
 - d. Faktor struktur birokrasi yang meliputi kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparat. Akan tetapi, program Perwal no. 12 tahun 2009 belum dilengkapi dengan SOP, sehingga prosedur yang dijalankan meliputi instruksi dari ketua BPG

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penyusun mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi gizi buruk tahun 2009-2011 melalui Perwal no.12 tahun 2009 diharapkan dapat dioptimalkan dengan melakukan sosialisasi program secara terpadu khususnya kepada masyarakat selaku kelompok sasaran untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap Perwal no. 12 tahun 2009. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya Posyandu yang cukup dekat dengan masyarakat selaku kelompok sasaran.
2. Implementasi kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi gizi buruk tahun 2009-2011 melalui Perwal no.12 tahun 2009 idealnya didukung dengan adanya struktur birokrasi yang mudah dijalankan. Oleh karena itu disarankan agar pihak penentu kebijakan RPG dapat menyusun SOP yang jelas dan terperinci agar aparat dapat dengan